

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara sederhana, Joseph A. Schumpeter dalam tulisannya yang terkenal “*Capitalism, Socialism, and Democracy*” mendefinisikan makna demokrasi sebagai suatu mekanisme adanya pemilihan oleh rakyat untuk memberi kekuasaan pada pemerintah sebagai pembuat keputusan-keputusan atau kebijakan untuk rakyat (Nasiruddin et al., 2024). Berdasarkan makna tersebut, salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada adalah momen rakyat menjalankan kedaulatannya di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan memilih calon Kepala Daerah secara langsung dan demokratis (Lestari, 2019). Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah dilakukan melalui mekanisme yang demokratis.

Sesuai peraturan dalam UUD yang telah disebutkan di atas, Pemilihan Gubernur (Pilgub) merupakan salah satu rangkaian dalam pelaksanaan Pilkada yang diselenggarakan serentak di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk Jakarta. Pilgub di Jakarta menjadi salah satu rangkaian Pilkada yang menarik perhatian publik, karena statusnya yang masih menyandang sebagai ibukota negara (Rully et al., 2021). Secara historis, Pilgub Jakarta memiliki daya tarik yang melebihi Pilkada

semata karena Jakarta merupakan pusat ekonomi, politik, dan media nasional. Selain itu, dinamika politiknya yang kompleks serta adanya keterlibatan berbagai kepentingan politik menjadi keunikan tersendiri pada Pilgub Jakarta 2024 (Wicaksono, 2019).

Pilgub Jakarta 2024 mempertemukan figur-figur yang memiliki rekam jejak kuat di bidang politik sekaligus menghadirkan persaingan yang tidak hanya mengandalkan elektabilitas, tetapi juga dukungan elite nasional. Hal tersebut membuat terbentuknya koalisi-koalisi, seperti dukungan dari mantan Presiden Joko Widodo serta mantan Gubernur Anies Baswedan dan Basuki Tjahaya Purnama. Di tengah persaingan tersebut, strategi kampanye menjadi semakin kompleks. Selain melakukan pendekatan secara konvensional, para kandidat juga memanfaatkan kekuatan media sosial, *personal branding*, dan komunikasi politik yang persuasif (Rahman, 2019). Kampanye yang dilakukan tidak hanya bertujuan mengenalkan program kerja, tetapi juga membentuk citra, membangun narasi, dan mempengaruhi persepsi rakyat (pemilih) secara psikologis, emosional, dan rasional (Pasaribu et al., 2022).

Pada konteks kontestasi politik, pemilih dikategorikan ke dalam beberapa tipe, salah satunya pemilih rasional. Anthony Downs (1957) dalam tulisannya yang berjudul "*An Economic Theory of Democracy*" menjelaskan bahwa rakyat sebagai pemilih rasional merupakan individu yang membuat keputusan politik berdasarkan pertimbangan logis serta perhitungan manfaat dan kerugian untuk dirinya dari setiap pilihan politisi yang ada (Ichsan Bayunta & Raffiudin, 2023). Mereka cenderung aktif dalam mencari informasi tentang kandidat sebanyak mungkin,

mempertimbangkan rekam jejaknya, dan membandingkan program kerja kandidat sebelum menentukan pilihan. Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai bagian dari kelompok pemilih terdidik memiliki kecenderungan untuk bersikap lebih kritis dan rasional (Agus et al., 2020).

Menurut teori Habermas, ia menekankan bahwa penting adanya diskusi rasional di ruang publik sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan politik (Zakiyah et al., 2024). Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu telah memberikan ruang bagi kandidat untuk saling beradu gagasan melalui debat yang disiarkan di berbagai *platform* media. Debat publik berfungsi sebagai sarana bagi para kandidat untuk menyampaikan secara langsung visi, misi, dan rencana program kerja mereka kepada masyarakat (Kurnia et al., 2022). Melalui debat, pemilih khususnya di kalangan mahasiswa dapat mengevaluasi secara langsung kapasitas, integritas, serta komitmen calon pemimpin dalam menangani permasalahan yang ada di Jakarta (Kamindang et al., 2023).

Dalam konteks Pilgub Jakarta 2024, debat publik semakin relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi (Prisilia Sumombo et al., 2025). Kampanye politik kini tidak hanya berlangsung melalui media konvensional, tetapi juga melalui *platform* digital yang disebarakan melalui YouTube, Instagram, Tiktok, hingga Twitter (X) (Majid & Dwi, 2023). Media sosial telah menjadi ruang bagi kandidat untuk menyebarluaskan pesan politik mereka kepada pemilih, khususnya mahasiswa. Sehingga selain dengan menonton debat secara langsung di televisi, pemilih juga dapat terpapar informasi dari debat lewat cuplikan atau potongan video

hingga membaca ulasan berupa kritikan di media sosial. Dalam hal ini baik secara konvensional maupun digital, media berperan penting sebagai saluran komunikasi politik yang menjembatani antara kandidat dan masyarakat. Pandangan McQuail (2011) turut memperkuat yang mengatakan media memiliki beberapa fungsi dalam sistem politik, yakni sebagai penyebar informasi, pengawas kekuasaan (*watchdog*), hingga forum diskusi publik (Fadila et al., 2024:25).

Paparan media terhadap debat Pilgub, terutama media digital memiliki dampak signifikan terhadap proses pengambilan keputusan memilih kandidat. Sejalan dengan tujuan diadakannya debat ialah untuk menggali lebih dalam berbagai perspektif kandidat dan untuk meyakinkan pemilih bahwa argumen yang dikemukakan memiliki keunggulan dibandingkan pandangan lainnya (Juditha & Darmawan, 2024). Melalui debat, kandidat diberi kesempatan untuk menyoroti perbedaan dalam visi, kebijakan, dan pendekatan mereka terhadap isu-isu yang dihadapi masyarakat secara langsung. Dengan kata lain, debat tidak hanya berfungsi jadi ajang adu gagasan, tetapi juga sebagai alat ukur yang bisa membantu mahasiswa dalam menentukan pilihan kandidat secara lebih terinformasi dan rasional.

Keikutsertaan mahasiswa khususnya dari lingkup Program Studi PPKn dalam menyaksikan tayangan debat turut menjadi membantu meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi dalam debat politik menjadi salah satu bukti nyata berjalannya pilar demokrasi substantif di Indonesia, yakni demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural seperti mencoblos saja tetapi juga menekankan pada kualitas partisipasi dan

kesadaran politik warga negara (Kurnia et al., 2022). Debat publik tidak hanya memberikan informasi yang diperlukan pemilih, tetapi juga menciptakan ruang untuk transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan politik bagi masyarakat. Sehingga debat publik berperan sebagai salah satu pilar dalam proses pemilihan yang demokratis (Rawis et al., 2019).

Sejalan dengan pendapat di atas, terdapat beberapa penelitian yang telah membuktikan efektivitas debat saat pemilihan. Penelitian berjudul "*Pengaruh Debat Calon Presiden/Wakil Presiden terhadap Preferensi Pemilih Pemula pada Pilpres 2019*" menunjukkan bahwa elektabilitas kandidat dalam debat dapat meyakinkan preferensi pemilih pemula (Bayu, 2020). Penelitian lain yang dilakukan oleh (Patasaka & Wansaga, 2025) dengan judul "*Pengaruh Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Kelurahan Bahu pada Pemilu 2024*" membuktikan bahwa debat kandidat presiden dan wakil presiden berperan secara signifikan terhadap perilaku memilih (menguatkan pilihan) masyarakat di Kelurahan Bahu dalam memilih pasangan calon pada pemilu 2024.

Namun berdasarkan data yang diperoleh dari laman detik.com, hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan bahwa hanya 30,3% responden yang mengaku menonton debat Pilgub Jakarta. Padahal, menurut survei SMRC pada debat Pilgub 2017 tercatat sebanyak 62% responden menyaksikan debat. Perbedaan ini tentu menjadi pertanyaan besar mengenai perubahan perilaku pemilih dalam mengakses informasi politik. Jika dilihat secara teori, debat publik saat momen elektoral berfungsi sebagai wadah bagi pemilih untuk menilai kualitas

kandidat secara langsung. Namun data di atas menunjukkan bahwa antusiasme rakyat sebagai pemilih terhadap pelaksanaan debat publik mengalami penurunan drastis.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, beberapa mahasiswa juga mengaku tidak tertarik untuk menonton debat Pilgub 2024 secara lengkap karena beberapa alasan. Ada yang mengatakan format debat kurang menarik, tidak peduli, hingga membuang-buang waktu. Berbekal pada data permasalahan dan hasil observasi di atas, maka penelitian ini difokuskan untuk mengamati secara lebih detail dan melakukan analisis lebih mendalam terkait **“Hubungan Paparan Debat Publik pada Pilgub Jakarta 2024 dengan Keputusan Memilih Mahasiswa (Studi Kuantitatif Mahasiswa PPKn FISH UNJ).”**

B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan sejumlah permasalahan yang muncul sebagai berikut:

1. Bagaimana peran debat publik dalam membantu mahasiswa mengambil keputusan secara rasional?
2. Bagaimana hubungan antara paparan debat publik pada Pilgub Jakarta 2024 dengan keputusan memilih mahasiswa PPKn FISH UNJ?

C. Pembatasan Masalah

Merujuk pada identifikasi masalah yang telah diuraikan, perlu dilakukan pembatasan penelitian agar cakupan pembahasan penelitian tidak terlalu luas.

Penelitian ini dibatasi pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta tahun angkatan 2021, 2022, dan 2023 sebagai subjek dengan fokus pada konteks Pilgub Jakarta 2024. Kajian ini hanya menganalisis hubungan paparan debat publik pada Pilgub Jakarta 2024 dengan keputusan memilih mahasiswa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan survei *online* melalui *google form*. Adapun variabel bebas berupa paparan debat publik pada Pilgub Jakarta 2024 dan variabel terikat berupa keputusan memilih mahasiswa.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi serta batasan masalah yang sudah dideskripsikan, maka bisa disimpulkan perumusan masalah dalam penelitian ini yakni “Apakah terdapat hubungan antara paparan debat publik pada Pilgub Jakarta 2024 dengan keputusan memilih mahasiswa PPKn FISH UNJ?”

E. Manfaat Penelitian

Dengan pelaksanaan penelitian ini, peneliti berharap hasilnya dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, baik dalam ranah akademis maupun praktis, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana hubungan paparan debat publik sebagai salah satu

elemen kampanye politik dengan keputusan politik di kalangan mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pengembangan kajian keilmuan PPKn di perguruan tinggi (*civic akademik*) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman serta menjadi pendorong untuk dilakukannya penelitian lain yang mengkaji lebih dalam tentang hubungan paparan debat publik dengan keputusan memilih mahasiswa. Temuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan serta rekomendasi bagi pihak KPU untuk dapat meningkatkan kualitas debat dengan mengangkat isu konten dalam debat yang lebih menarik serta mengatur format debat publik yang lebih interaktif dan relevan bagi kebutuhan pemilih terutama pemilih muda.